



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ROY RIZALI ANWAR
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 635334

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.664.000.000

1. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA TANAH BUMBU, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1113 m2/70 m2 di KAB / KOTA TANAH BUMBU, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
3. Tanah Seluas 285 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 57.000.000
4. Tanah Seluas 285 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 57.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 50.000.000

D. SURAT BERTHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 51.759.602

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.765.759.602

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.765.759.602

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.